

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah mengeluarkan Peraturan Daerah terkait Retribusi Parkir Berlangganan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai bentuk penyesuaian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 guna mengupayakan kemandirian daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam upaya ini Kabupaten Bangkalan menerapkan tarif parkir berlangganan, dimana tarif retribusi yang dibebankan kepada tiap pengendara berbeda-beda. Program parkir berlangganan ini merupakan retribusi yang dipungut selama 1 tahun. Dengan adanya peraturan tentang parkir berlangganan ini untuk mengetahui problematika dari penerapan retribusi parkir berlangganan. Dengan mengetahui bagaimana pelaksanaan retribusi jasa parkir umum di Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, serta bagaimana keefektivitasan penerapan hukum pada retribusi jasa parkir umum di Kabupaten Bangkalan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif digabungkan dengan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan belum maksimal dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya pelaksanaan dari retribusi parkir berlangganan, masih adanya juru parkir yang masih melakukan pemungutan liar, serta kurangnya keamanan di area parkir berlangganan yang belum optimal yang membuat masyarakat tidak tenang ketika memparkir kendaraan mereka. Namun, penerapan hukum dari retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, telah memenuhi asas pembentukan perundang-undangan, materi muatannya sudah sesuai dengan asas yang dikeluarkan dan sudah memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang termuat dalam konsideral menimbang.

Kata Kunci: retribusi, problematika, penerapan

ABSTRACT

The Bangkalan Regency Government has issued a Regional Regulation related to Subscription Parking Levies as stipulated in Regional Regulation Number 9 of 2010 concerning General Service Levies as a form of adjustment to Law Number 28 of 2009 in order to seek regional independence in increasing Regional Original Revenue (PAD). In this effort, Bangkalan Regency applies a subscription parking tariff, where the retribution rate charged to each driver is different. This subscription parking program is a levy that is collected for 1 year. With the existence of this regulation on subscription parking to find out the problematics of the implementation of subscription parking levies. By knowing how the implementation of public parking service retribution in Bangkalan Regency is in accordance with Regional Regulation Number 9 Year 2010, and how the effectiveness of the application of law on public parking service retribution in Bangkalan Regency.

The research method used is empirical juridical. The approach taken is a descriptive qualitative approach combined with a case study approach.

The result of the research shows that the implementation of subscription parking levy in Bangkalan Regency has not been maximized due to the lack of public knowledge on the implementation of subscription parking levy, the existence of parking attendants who still conduct illegal collection, and the lack of security in the subscription parking area which has not been optimized which makes the public not calm when parking their vehicles. However, the legal implementation of the subscription parking levy in Bangkalan Regency is in accordance with the hierarchy of laws and regulations, has fulfilled the principles of legislation formation, the content material is in accordance with the principles issued and has fulfilled the philosophical, sociological, and juridical foundations contained in the weighing considers.

Keywords: *retribution, problems, implementation*